

IMPLEMENTASI SOSIALISASI PEREMPUAN DAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT PEDESAAN UNTUK BERADAPTASI DAN TETAP TEGUH PADA MASA ENDEMI DI DESA KARYA TANI

¹Yeni Yusnety, ²Meilda Nur Sfafira, ³Fenni Puspitasari, ⁴Darmiwati

¹²³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

⁴Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Islam Indragiri

Email: yenyusnetyofficial@gmail.com, meildanso7@gmail.com, fenipuspitasari14@gmail.com, darmiwatioo@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam menghadapi masa endemi, implementasi kegiatan sosialisasi perempuan dan pemilu memiliki potensi besar untuk mencapai solusi dan hasil yang positif. Kesimpulan dari langkah-langkah ini adalah sebagai berikut: Partisipasi Pemilu yang Lebih Aktif: Kegiatan sosialisasi dapat mendorong perempuan di pedesaan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu, menciptakan representasi yang lebih baik dan demokrasi yang lebih inklusif. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Masyarakat pedesaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menghadapi endemi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam situasi darurat. Perubahan Sosial Positif: Melalui kampanye kesetaraan gender, sosialisasi ini dapat berdampak pada perubahan sosial yang lebih besar, menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan di pedesaan. Kesiapan Lebih Baik: Masyarakat pedesaan akan lebih siap menghadapi endemi dengan pengetahuan dan kesiapan yang mereka peroleh melalui kegiatan sosialisasi. Peningkatan Akses Teknologi: Perempuan di pedesaan akan mendapatkan manfaat dari akses yang ditingkatkan ke teknologi, memungkinkan mereka untuk mengikuti pemilu dan mengakses informasi yang relevan. Penguatan Kemitraan: Kemitraan dengan lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat implementasi kegiatan sosialisasi dan memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan. Peningkatan Kesadaran Kesehatan: Lebih banyak masyarakat pedesaan yang akan menerapkan praktik-praktik kesehatan yang benar selama masa endemi, mengurangi risiko penyebaran penyakit. Dengan demikian, implementasi kegiatan sosialisasi perempuan dan pemilu bukan hanya akan meningkatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga mempersiapkan masyarakat pedesaan untuk mengatasi tantangan endemi dan menciptakan perubahan sosial yang lebih positif. Kegiatan ini harus didukung oleh perencanaan yang matang, kolaborasi yang kuat, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam memenuhi tujuan sosialisasi ini.

Keywords: Sosialisasi, Perempuan, Pemilu, Pedesaan, Masa Endemi.

ABSTRACT

In order to increase the capacity of rural communities to face endemic times, the implementation of women's outreach and election activities has great potential to achieve positive solutions and results. The conclusions of these steps are as follows: More Active Election Participation: Outreach activities can encourage women in rural areas to actively participate in the electoral process, creating better representation and a more inclusive democracy. Increased Knowledge and Skills: Rural communities will have a better understanding of how to deal with endemics and the skills needed to overcome challenges in emergency situations. Positive Social Change: Through gender equality campaigns, this outreach can impact greater social change, resulting in a more inclusive and equitable environment for women in rural areas. Better Preparedness: Rural communities will be better prepared to face endemics with the knowledge and preparedness they gain through outreach

Yusnety, Implementasi Sosialisasi Perempuan Dan Pemilu Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Pedesaan Untuk Beradaptasi Dan Tetap Teguh Pada Masa Endemi Di Desa Karya Tani

activities. Improved Access to Technology: Women in rural areas will benefit from improved access to technology, enabling them to contest elections and access relevant information. Strengthening Partnerships: Partnerships with government agencies, NGOs, and civil society organizations can strengthen the implementation of outreach activities and provide sustainable support for rural communities. Increased Health Awareness: More rural communities will adopt proper health practices during endemic times, reducing the risk of disease spread. Thus, the implementation of women's outreach and election activities will not only increase participation in elections, but also prepare rural communities to overcome endemic challenges and create more positive social change. These activities must be supported by careful planning, strong collaboration, and regular evaluation to ensure long-term success in meeting these socialization goals.

Keywords: Socialization, Women, Elections, Rural Areas, Endemic Period.

1 PENDAHULUAN

Potret keterlibatan perempuan dalam Politik di Indonesia merupakan wujud dari terciptanya sebuah negara demokrasi dimana partisipasi dan representasi yang seimbang menjadi sebuah persyaratan penting (Rahmatunnisa, Mudyati. 2018). Adapun Pemikiran mendasar dari demokrasi itu ialah mengenai konsep partisipasi politik yang juga mengacu pada aspek keterlibatan perempuan. Sehingga kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan partisipasi masyarakat (pemilu, bergabung dalam partai politik, menjadi anggota legislatif, dan sebagainya) harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan. Partisipasi secara harfiah memiliki arti “Turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Dalam konsep kebahasaan, partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan, dan kemandirian warga negara (Mukaro, Zaenal. 2008:257). Dengan demikian partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara dalam politik.

Menurut Surbakti, (dalam Mukaro, Zaenal. 2008: 257) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang didasari nilai-nilai partisipasi seperti keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam proses pemilihan pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dewasa ini, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik, serta tuntutan terhadap adanya pembuatan kebijakan publik yang lebih feminis (Batubara, dkk. 2018: 1).

Dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus (afirmatif action) untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” yang mana hal ini dinilai sebagai usaha Pemerintah dalam memperluas ruang gerak kaum perempuan dalam Dunia Politik. Hasil dari dikeluarkannya kebijakan tentang afirmatif action rupanya berdampak baik terhadap hasil pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2004. Data menampilkan angka keterwakilan perempuan dalam DPR RI sebesar 11,09%, telah mengalami peningkatan sebanyak 2,09% dari pemilu tahun 1999 (<https://rumahpemilu.org>). Hal ini sebenarnya dipengaruhi juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menyangkut kuota gender.

Kuota gender adalah bentuk tindakan afirmatif yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan di ranah politik (Rahmatunnisa, M. 2018:3). Kuota gender saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kesemuanya berorientasi pada penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan, baik dalam kepengurusan partai politik maupun sebagai syarat partai politik untuk menjadi bakal calon peserta pemilu. Melalui kuota gender ini, secara tidak langsung pemerintah memperkokoh ruang gerak

perempuan untuk semakin meningkatkan partisipasinya dalam ranah politik secara khusus pada kontestasi tradisi pemilu di Indonesia.

Realitanya kehadiran Undang-Undang di atas meskipun memberi dampak peningkatan terhadap keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif, namun belum seutuhnya mewujudkan keterwakilan kaum perempuan sesuai dengan amanat undang-undang. Benar adanya bahwa pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan dalam keikutsertaannya pada partisipasi politik telah dipraktikkan sebagaimana mestinya (Kiftiyah, Anifatul. 2019:7). Berdasarkan hasil pemilu tingkat nasional pada tahun 2009 dan 2019 diperoleh data, pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen hanya naik sebesar 17,32% atau 97 orang dari total 560 kursi. Pada Pemilu 2019, jumlah keterwakilan perempuan pun hanya bertambah menjadi 118 kursi atau 21% dari total 575 kursi di DPR (<https://rumahpemilu.org>). Angka-angka ini menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal jika bertolak pada data nasional Badan Pusat Statistik Indonesia sampai pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.4 juta jiwa dan sekitar 133.4 juta di antaranya adalah perempuan (<http://www.bps.go.id>). Inilah kenyataan sebenarnya dari potret keterlibatan perempuan dalam politik yang ada di Indonesia saat ini.

Beralih ke tingkat lokal, hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif yang diadakan secara berkala juga menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Terutama Di wilayah Kabupaten Ngada dalam tiga periode terakhir sebelum terlaksananya Pemilu tahun 2019. Walaupun keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif meningkat, namun masih belum juga menunjukkan terpenuhinya kuota 30 persen perwakilan perempuan di dalam parlemen itu sendiri. Pada Pemilu tahun 2004 hanya terdapat 2 orang anggota perempuan terpilih (6,66%) dari 30 anggota dewan legislatif di Kursi DPRD Kabupaten Ngada. Pada Pemilu tahun 2009 bertambah menjadi 3 orang anggota perempuan terpilih (10,00%) dari 30 orang anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada dan pada Pemilu tahun 2014 bertambah menjadi 5 orang anggota perempuan terpilih (20,00%) dari 25 anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada (Anggara, Ria. 2018:54). Data-data ini sepenuhnya belum menampilkan 30 persen profil keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Bahkan pada pemilu legislatif tahun 2019, caleg perempuan yang terpilih dan mendapat kursi di Lembaga DPRD Kabupaten Ngada justru mengalami penurunan secara signifikan sebesar 16,00%. Padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi terwujudnya jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan politik.

Masyarakat pada umumnya masih merasa apriori jika membicarakan politik. Masyarakat selalu berpikir mengenai politik dengan sesuatu yang kotor, jahat dan menakutkan. Sehingga masyarakat tak berani menyentuhnya, apalagi berkiprah didalamnya. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat telah menyadari bahwa sebenarnya mereka ikut pula menentukan kehidupan negara, yang notabene adalah keikutsertaan mereka dalam kehidupan politik.

Di dalam kehidupan bermasyarakat memang tidak semua orang mampu berperan aktif didalamnya. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik adalah mereka yang mengenyam pendidikan sekolah, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan aktif berorganisasi. Dengan bekal pendidikan orang menjadi sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai warga suatu negara. Tetapi inipun tidak cukup bila tanpa dibarengi dengan pemberian kesempatan untuk memperjuangkan dan mempertahankan haknya secara demokratis tanpa mengabaikan kewajiban. Sebab sering terjadi, orang terlalu menuntut hak dan mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya.

Pembangunan disegala bidang menghendaki partisipasi masyarakat, sebab hasilnya nanti akan dinikmati juga. Usaha-usaha yang biasanya dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik ada bermacam-macam. Usaha tersebut antara lain adanya sejumlah kecil negara berkembang yang memperkenankan adanya partai oposisi, ada pula yang meluluskan adanya pemilu yang bebas bersaing dimana para pemilih diberikan kesempatan untuk memilih pelbagai calon yang berbeda pandangan

Yusnety, Implementasi Sosialisasi Perempuan Dan Pemilu Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Pedesaan Untuk Beradaptasi Dan Tetap Teguh Pada Masa Pandemi Di Desa Karya Tani

Pasca-reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik memilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik memilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 tingkat partisipasi politik memilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2019 tingkat partisipasi politik memilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. partisipasi memilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen.

Memang sulit suatu negara untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan politik yang sehat dan dapat berhasil menumbuhkan partisipasi politik masyarakat, tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Pemilu di Indonesia dipandang juga sebagai wahana pendidikan politik yang dapat dipakai sebagai indikator sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dibidang politik. Karena jumlah suara yang diperoleh akan menentukan jumlah wakil-wakil rakyat dalam MPR, untuk selanjutnya akan memilih presiden yang akan menyelenggarakan roda pemerintahan.

2 METODE PELAKSANAAN

Wawancara dan observasi ekepada masyarakat selama masa KKN di Kelurahan Sungai Perak kecamatan Tembilihan dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi dengan pedoman umum untuk mengumpulkan data dari subjek. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana memberikan pemahaman tentang sosialisasi perempuan dan pemilu dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk beradaptasi dan tetap teguh pada masa endemi di Desa Karya Tani.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kegiatan sosialisasi perempuan dan pemilu dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam menghadapi masa endemi adalah langkah penting untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam proses demokrasi serta peningkatan kesiapan mereka menghadapi situasi darurat seperti pandemi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini:

- 1) **Penyusunan Rencana Kegiatan:** Buat rencana kegiatan yang mencakup tujuan, target, jadwal, dan metode yang akan digunakan dalam sosialisasi. Pastikan bahwa rencana ini mencakup semua aspek yang relevan, termasuk pemahaman pemilu dan penanganan endemi.
- 2) **Pelatihan dan Edukasi:** Selenggarakan pelatihan dan workshop untuk masyarakat pedesaan, terutama perempuan, tentang pentingnya pemilu dan langkah-langkah untuk berpartisipasi dalamnya. Sosialisasikan juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat seperti pandemi.
- 3) **Penggunaan Media Sosial dan Teknologi:** Manfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan penanganan endemi. Bantu masyarakat pedesaan, khususnya perempuan, untuk menggunakan platform digital dan akses informasi yang relevan.
- 4) **Sosialisasi Melalui Kelompok Masyarakat:** Bentuk kelompok-kelompok diskusi atau kelompok studi yang terdiri dari perempuan di pedesaan. Diskusikan isu-isu pemilu dan cara menghadapi endemi dalam konteks masyarakat mereka.
- 5) **Penyuluhan Kesehatan dan Keamanan:** Sosialisasikan informasi terkait kesehatan dan keamanan dalam menghadapi masa endemi. Berikan pengetahuan tentang langkah-langkah pencegahan, perlindungan, dan tindakan darurat.
- 6) **Kemitraan dengan Lembaga Terkait:** Bekerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam pemilu dan penanganan endemi.

Mereka dapat memberikan sumber daya tambahan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.

- 7) Kampanye Kesetaraan Gender: Selain pemilu dan penanganan endemi, ajak perempuan untuk terlibat dalam kampanye kesetaraan gender. Dorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan berpartisipasi dalam berbagai bidang.
- 8) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja: Lakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan sosialisasi untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan efektif dan bahwa masyarakat pedesaan benar-benar mendapatkan manfaatnya. Dengan evaluasi ini, Anda dapat menyesuaikan strategi sosialisasi jika diperlukan.
- 9) Pemantauan Pemilu dan Respons Terhadap Endemi: Ajak perempuan dalam masyarakat pedesaan untuk mengikuti pemilu dan berpartisipasi dalam pemantauan proses pemilu. Selain itu, berikan panduan tentang cara merespons situasi darurat seperti endemi, termasuk langkah-langkah kesiapsiagaan yang harus diambil.
- 10) Peningkatan Akses Pemilu: Pastikan bahwa perempuan di pedesaan memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk akses ke tempat pemungutan suara dan informasi tentang calon dan platform politik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat pedesaan, terutama perempuan, dapat lebih siap menghadapi masa endemi sambil tetap aktif dalam proses demokrasi melalui pemilu. Ini akan mempromosikan partisipasi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam situasi darurat.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Perempuan Dan Pemilu

Solusi dan hasil dari kegiatan sosialisasi perempuan dan pemilu dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam menghadapi masa endemi dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin tercapai dan hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut:

Solusi:

- 1) Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pemilu: Dengan sosialisasi yang efektif, perempuan di pedesaan akan lebih memahami pentingnya pemilu dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum.
- 2) Pengetahuan tentang Penanganan Endemi: Masyarakat pedesaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menghadapi endemi, termasuk langkah-langkah pencegahan, respons darurat, dan perlindungan kesehatan.

- 3) Peningkatan Keterampilan Teknologi: Perempuan di pedesaan yang awalnya mungkin tidak terbiasa dengan teknologi akan dapat menggunakan media sosial dan teknologi untuk mengakses informasi terkait pemilu dan endemi.
- 4) Peningkatan Kesadaran Kesetaraan Gender: Kampanye kesetaraan gender dapat menyebabkan perubahan sosial yang lebih besar dalam masyarakat pedesaan, memungkinkan perempuan untuk memiliki suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan.
- 5) Jaringan Sosial yang Lebih Kuat: Kegiatan sosialisasi dapat memperkuat jaringan sosial di pedesaan, memungkinkan masyarakat untuk berkolaborasi dalam situasi darurat dan pemilihan umum.

Hasil:

- 1) Partisipasi Pemilu yang Lebih Tinggi: Terlihat peningkatan dalam partisipasi perempuan dalam pemilu, yang menciptakan representasi yang lebih baik dari beragam perspektif dalam politik.
- 2) Kesiapan Lebih Baik Menghadapi Endemi: Masyarakat pedesaan akan lebih siap menghadapi masa endemi dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh melalui sosialisasi.
- 3) Peningkatan Kesadaran Kesehatan: Lebih banyak masyarakat di pedesaan yang menerapkan praktik-praktik kesehatan yang benar selama endemi, mengurangi risiko penyebaran penyakit.
- 4) Pengaruh Positif pada Pengambilan Keputusan: Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional akan meningkat, menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pedesaan.
- 5) Kemitraan yang Kuat: Kemitraan yang terbentuk dengan LSM dan lembaga lainnya dapat membantu dalam menjalankan proyek-proyek berkelanjutan dan mendukung masyarakat pedesaan dalam menghadapi tantangan masa depan.
- 6) Peningkatan Akses Teknologi: Masyarakat pedesaan yang semula mungkin kurang terhubung dengan teknologi akan mendapatkan manfaat dari akses yang ditingkatkan, yang dapat digunakan dalam pemilu dan untuk informasi lainnya.
- 7) Kesadaran Kesetaraan Gender yang Meningkat: Terjadi pergeseran budaya yang lebih besar menuju kesetaraan gender di masyarakat pedesaan, yang dapat membawa perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari.

Solusi dan hasil dari kegiatan sosialisasi ini akan tergantung pada implementasi yang cermat, komitmen penuh dari semua pihak terlibat, dan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa tujuan sosialisasi tercapai. Dengan demikian, masyarakat pedesaan dapat menjadi lebih kuat dalam menghadapi masa endemi dan lebih aktif dalam proses demokrasi.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam menghadapi masa endemi, implementasi kegiatan sosialisasi perempuan dan pemilu memiliki potensi besar untuk mencapai solusi dan hasil yang positif. Kesimpulan dari langkah-langkah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi Pemilu yang Lebih Aktif: Kegiatan sosialisasi dapat mendorong perempuan di pedesaan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu, menciptakan representasi yang lebih baik dan demokrasi yang lebih inklusif.
- 2) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Masyarakat pedesaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menghadapi endemi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam situasi darurat.
- 3) Perubahan Sosial Positif: Melalui kampanye kesetaraan gender, sosialisasi ini dapat berdampak pada perubahan sosial yang lebih besar, menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan di pedesaan.
- 4) Kesiapan Lebih Baik: Masyarakat pedesaan akan lebih siap menghadapi endemi dengan pengetahuan dan kesiapan yang mereka peroleh melalui kegiatan sosialisasi.

- 5) Peningkatan Akses Teknologi: Perempuan di pedesaan akan mendapatkan manfaat dari akses yang ditingkatkan ke teknologi, memungkinkan mereka untuk mengikuti pemilu dan mengakses informasi yang relevan.
- 6) Penguatan Kemitraan: Kemitraan dengan lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat implementasi kegiatan sosialisasi dan memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan.
- 7) Peningkatan Kesadaran Kesehatan: Lebih banyak masyarakat pedesaan yang akan menerapkan praktik-praktik kesehatan yang benar selama masa endemi, mengurangi risiko penyebaran penyakit.

Dengan demikian, implementasi kegiatan sosialisasi perempuan dan pemilu bukan hanya akan meningkatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga mempersiapkan masyarakat pedesaan untuk mengatasi tantangan endemi dan menciptakan perubahan sosial yang lebih positif. Kegiatan ini harus didukung oleh perencanaan yang matang, kolaborasi yang kuat, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam memenuhi tujuan sosialisasi ini.

REFERENSI

- [1] Abdurrachman, Hamidah. "Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019". *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.1, No.1 (2019): 124-149.
- [2] Adnan, Suriadi, dkk. "Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender". *Jurnal Politik dan Gender*, Vol.18, No.1 (2018) : 247-270.
- [3] Agnes, Pratitis Offi, Diana DS, dkk. , " partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa". *Jurnal Empirika*. Vol.1, N.2 (2016): 141-162
- [4] Amalia, Endah, Ashifa Az-Zahra, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan". *Jurnal Ahkam*, Vol.8, No.2 (2020): 213- 232
- [5] Arbain, Janu, Nur Azizah, dkk. " Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer dan Mansour Fakih", UIN Walisongo, Vol. 11, No.1 (2015): 75-94
- [6] Ardiansa, Dirga. "Manghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia". *Jurnal Politik: Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia*, Vol 2, No 1, Agustus (2016): 71-99
- [7] Asnawiah, Nurul, Titin Purwaaningsih. Analisis Representasi Substansi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019. *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol.4, No.1 (2020): 70-101.
- [8] Azmy, Anna Sabhana, Isnaini Anis Farhah. "Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dala Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol 14 No.1 (2018): 76-83
- [9] Budiardjo, Miriam. , "Dasar- Dasar Ilmu Politik". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka (2007).
- [10] Darmansyah, Ramlan, Ade Sartika. "Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019- 2024)", *Jurnal Civics and Social Studies*, Vol.5, No. 1 (2021): 1- 15
- [11] Wandu, I. Muchlis Adnan, Jamri, R. Habib, and M. Rasyid Ridha, "Penguatan Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir", *JKA* , vol. 4, no. 1, pp. 1-9, Jul. 2023.
- [12] Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- [13] Fana, Fofi. Fat'ul Indayati, dkk. , "Stereotip Gender Perempuan Pada Masyarakat Desa Klepu Kecamatan Sudimoro Pacitan", Surabaya: Universitas Negeri Semarang, 2018: 1365-2375
- [14] Farhah, Isnaini Anis. Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan "Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Lebak Periode 2014-2019". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2018).